

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TIM KAJIAN *HYBRID WORK MODEL*  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan implementasi *Hybrid Work Model* yang dilakukan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) sebagai sebuah alternatif sistem kerja baru sebagaimana ketentuan di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* beserta perubahannya serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru beserta perubahannya, perlu menyusun Kajian *Hybrid Work Model* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Kajian *Hybrid Work Model* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian *Hybrid Work Model* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kajian *Hybrid Work Model* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN *HYBRID WORK MODEL* DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kajian *Hybrid Work Model* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian *Hybrid Work Model* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan untuk Kajian *Hybrid Work Model* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

b. Menyusun laporan hasil Kajian *Hybrid Work Model* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Pelaksanaan Kajian *Hybrid Work Model* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN  
*HYBRID WORK MODEL* DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KAJIAN *HYBRID WORK MODEL*  
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kedudukan dalam Tim	No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi Eselon II
Ketua merangkap anggota	1.	Miftah Irfaniah	Analisis Kepegawaian Madya	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Anggota	1.	Dodi Wahyugi	Pranata Komputer Madya	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	2.	Festiana Niyanti	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	3.	Siti Ulyanah	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	4.	Sarah Arlina	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	5.	Nicke Kusuma Devi	Analisis Kepegawaian Muda	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	6.	Yudi Prasetiawan	Pranata Komputer Muda	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	7.	Cecep Hendar Supriadi	Analisis Kebijakan Pertama	Biro Perencanaan dan Keuangan
	8.	Imelda Liliana	Pranata Komputer Pertama	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

Kedudukan dalam Tim	No.	Nama	Jabatan	Unit Organisasi Eselon II
	9.	Agus Kurdi Wijaya	Pranata Komputer Pertama	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
	10.	Manshur Riadli	Analisis Kepegawaian Pertama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	11.	Martdetiara Dewi Kartika	Analisis Kepegawaian Pertama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	12.	Ajeng Septaria Diahmita	Analisis Kepegawaian Pertama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	13.	Setiawan Rahandi Sabri	Analisis Kepegawaian Pertama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	14.	Cecep Sutisna	Analisis Kepegawaian Pertama	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	15.	Muhammad Sukron Arif	Analisis Kinerja	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	16.	Nungky Karina Putri	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	17.	Meisiska	Analisis Pengembangan Kompetensi	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS